KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Evaluasi Program Kemiskinan dan Ketimpangan
**Tanggal** : Jumat, 29 Juli 2016
**Surat Kabar** : Pelita
**Halaman** : 2

# Evaluasi Program Kemiskinan dan Ketimpangan

***Jakarta, Pelita***

*Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.*

"Jadi sekarang kan sudah banyak anggaran yang katanya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Kami ingin tahu seberapa efektifnya program atau anggaran tersebut membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai sertijab di Jakarta, Kamis (28/7), seperti diberitakan *Antara*.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan intervensi secara agresif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, peran program serta anggarannya sangat menentukan.

"Yang pasti kami akan evaluasi dulu dampak dari program yang sudah ada karena program yang sudah ada kan bermacam-macam, ada PKH (program keluarga harapan), bantuan untuk siswa miskin, bantuan asuransi kesehatan, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan sebenarnya plus bansos-bansos itu," jelasnya.

Ia menginginkan, segala macam bentuk program bantuan atau dukungan kepada masyarakat, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. "Jangan nanti sudah keluar duit banyak, tapi kemiskinannya hanya turun sedikit, ketimpangannya tidak berkurang banyak," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86 persen dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang. Angka kemiskinan turun dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 11,22 persen, atau sebanyak 28,59 juta orang. Dibandingkan September 2015, juga terjadi penurunan. Angka kemiskinan September 2015 yaitu 11,13 persen, atau 28,51 juta orang.

Sementara itu, indeks rasio gini Indonesia atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia per September 2015 mencapai 0,40. Rasio gini tersebut turun 0,01 poin dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,41. Dalam sepuluh tahun terakhir rasio gini meningkat dari 0,33 persen menjadi 0,41 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menjelaskan, masuknya Sri Mulyani dalam kabinet diharapkan mampu menggali sumber-sumber baru penerimaan negara selain pajak. Ini ujian bagi Sri Mulyani dalam mengelola kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru mencapai targetnya.

"Dengan masuknya Sri Mulyani dengan segala kapasitas dan jaringannya, semoga bisa meningkatkan kepercayaan publik, terutama dunia usaha. Dalam jangka pendek pekerjaan rumah yang dibereskan adalah suksesnya UU Tax Amnesty untuk menggerakkan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur," katanya.

Sedangkan dalam jangka panjang perlu ada reformasi arsitektur keuangan nasional yang kuat untuk merespon tantangan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi.

Mengeai defisit APBN yang makin melebar, dibutuhkan sosok menteri yang tidak saja mengerti persoalan teknis, tapi juga *leadership* dan jaringan yang mumpuni.

"Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Dalam waktu dekat, itu mestu tergambar dalam rancangan RAPBN 2017 yang akan datang," katanya, Ia juga berharap seluruh kebijakan arsitektur keuangan nasional berjalan mulus. Dan itu butuh integritas yang kuat.

**Diharapkan mampu**

Tim ekonomi yang baru hasil perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengatasi permasalahan angka kemiskinan serta ketimpangan tingkat pendapatan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha, tapi kurang memihak kalangan dhuafa," kata Presiden PKS Sohibul Iman. Diharapkan tim ekonomi baru hasil perombakan kabient ini juga dapat lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, terutama bagi kalangan warga miskin.

Untuk itu, Presiden Jokowi dan tim ekonominya juga diharapkan untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi UMKM.

Menteri Keuangan yang baru dilantik Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan instrumen kebijakan fiskal di masa mendatang harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien," kata Sri. **(iz)**